

Analisis Implementasi Evaluasi Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka

Hendriyansyah¹, Maria Ulfa Yundiafi², Devi Marilawati³, Mustaqim Hasan⁴

¹Manajemen Pendidikan Islam, UPTD SD Negeri 2 Way Urang, Lampung, Indonesia

²Manajemen Pendidikan Islam, Universitas An-Nur Lampung, Lampung, Indonesia

³Manajemen Pendidikan Islam, MTsN 1 Way Kanan, Lampung, Indonesia

⁴Universitas An-Nur Lampung, Lampung, Indonesia

Email: ¹hendriyansyahersyakey@gmail.com, ²mariaulfayun@gmail.com, ³devimarilawati1981@gmail.com,

⁴mustaqimhasan@an-nur.ac.id

Informasi Artikel

Submitted : 25-05-2026

Accepted : 09-06-2026

Published : 15-08-2026

Keywords:

Learning Evaluation

Merdeka Curriculum

Assessment

Education

Abstract

The Merdeka Curriculum is an educational policy designed to improve the quality of learning through a more flexible approach, student-centered learning, and the strengthening of competencies and character development. In its implementation, learning evaluation becomes one of the important aspects to measure the success of the teaching and learning process. This article aims to analyze the implementation of learning evaluation in the Merdeka Curriculum, including planning, implementation, challenges, and improvement efforts in educational practices. The method used in this study is library research by reviewing various journals, books, and documents related to the Merdeka Curriculum. The results of the study indicate that learning evaluation in the Merdeka Curriculum emphasizes formative and summative assessments oriented toward the holistic development of students. Teachers are given the flexibility to determine evaluation methods according to students' characteristics and learning objectives. However, its implementation still faces several obstacles, such as limited teacher understanding, inadequate facilities, and adaptation to the new assessment system. Therefore, continuous training and support from various parties are needed so that learning evaluation in the Merdeka Curriculum can be implemented effectively

Abstrak

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta menekankan penguatan kompetensi dan karakter. Dalam implementasinya, evaluasi pembelajaran menjadi salah satu aspek penting untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka, meliputi perencanaan, pelaksanaan, kendala, dan upaya perbaikan dalam praktik pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai jurnal, buku, dan dokumen terkait Kurikulum Merdeka. Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka lebih menekankan asesmen formatif dan sumatif yang berorientasi pada perkembangan peserta didik secara holistik. Guru memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk evaluasi sesuai karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman guru, kesiapan sarana, dan adaptasi terhadap sistem penilaian baru. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan serta dukungan dari berbagai pihak agar evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara efektif

Kata Kunci: Evaluasi Pembelajaran, Kurikulum Merdeka, Asesmen, Pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang dimiliki. Oleh sebab itu, sistem pendidikan perlu terus dikembangkan agar mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dunia pendidikan dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi.[1]

Perkembangan dunia pendidikan menuntut adanya perubahan sistem pembelajaran yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta tantangan abad ke-21. Salah satu kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah Indonesia adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini hadir sebagai bentuk penyempurnaan sistem pendidikan yang memberikan kebebasan kepada guru dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Dalam penerapannya, evaluasi pembelajaran menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, efektivitas metode mengajar, serta perkembangan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. [2]

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari evaluasi Kurikulum Merdeka. Nasution [7] meneliti implementasi evaluasi pembelajaran PAI di SDN Medan dan menemukan bahwa guru masih kesulitan menerapkan asesmen formatif secara konsisten. Syifa dkk. [13] menganalisis asesmen formatif pada Fase B dan menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran mendalam bergantung pada pemahaman guru terhadap prinsip asesmen. Karim dan Suaedi [16] menekankan perlunya optimalisasi evaluasi berbasis Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Sementara itu, Tampubolon dkk. [9] menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka di SMP dan menemukan kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan. Studi-studi tersebut umumnya berfokus pada jenjang atau mata pelajaran tertentu, menggunakan pendekatan studi kasus empiris, dan belum memberikan sintesis menyeluruh yang menghubungkan berbagai dimensi evaluasi pembelajaran—mulai dari perencanaan asesmen, pelaksanaan, kendala struktural, hingga rekomendasi kebijakan—dalam satu kerangka yang komprehensif dan lintas jenjang. Kesenjangan inilah (gap) yang menjadi justifikasi dilakukannya studi kepustakaan ini: diperlukan sintesis sistematis dari berbagai temuan penelitian yang ada untuk membangun pemahaman holistik tentang kondisi aktual evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka di Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghadirkan Kurikulum Merdeka sebagai salah satu upaya transformasi pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada guru dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kurikulum ini juga menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga siswa dapat lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses belajar.[3]

Dalam pelaksanaan pembelajaran, evaluasi memiliki peran yang sangat penting. Evaluasi pembelajaran tidak hanya digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilakukan guru. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa, kesulitan belajar yang dialami, serta menentukan langkah perbaikan yang tepat.

Pada Kurikulum Merdeka, evaluasi pembelajaran mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan kurikulum sebelumnya. Penilaian tidak lagi hanya berfokus pada hasil akhir berupa angka, tetapi lebih menekankan pada proses perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan melalui asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif yang bertujuan membantu siswa mencapai kompetensi sesuai potensinya.[4]

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, teridentifikasi dua kesenjangan (gap) penelitian yang signifikan. Pertama, belum tersedia sintesis sistematis yang mengintegrasikan temuan dari berbagai studi tentang evaluasi Kurikulum Merdeka lintas jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) dalam satu kerangka analisis yang kohesif. Kedua, sebagian besar studi yang ada bersifat deskriptif dan belum mengkonseptualisasikan kendala implementasi dengan kerangka teori pendidikan yang relevan sehingga rekomendasi yang dihasilkan cenderung bersifat normatif dan kurang operasional. Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menyintesis secara kritis berbagai temuan penelitian tentang implementasi evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka; (2) menganalisis kendala-kendala struktural dan pedagogis yang menghambat implementasi evaluasi secara efektif; serta (3) merumuskan model rekomendasi strategis berbasis bukti yang dapat dioperasionalkan oleh guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelusuran literatur dilakukan melalui tiga basis data utama: Google Scholar, Portal Garuda (Indonesia), dan Semantic Scholar dengan rentang publikasi tahun 2020–2026. Kata kunci yang digunakan meliputi “evaluasi pembelajaran Kurikulum Merdeka”, “asesmen formatif Kurikulum Merdeka”, “implementasi penilaian Kurikulum Merdeka”, dan “assessment Merdeka Curriculum” (untuk sumber berbahasa Inggris). Total artikel yang diidentifikasi pada tahap awal berjumlah 87 artikel. Setelah melalui proses skrining judul dan abstrak, serta penerapan kriteria inklusi dan eksklusi, sebanyak 20 artikel dianalisis secara mendalam sebagai sumber data utama penelitian ini.

Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi: (1) artikel membahas evaluasi atau asesmen dalam konteks Kurikulum Merdeka secara eksplisit; (2) diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1–4 atau jurnal internasional bereputasi; (3) diterbitkan antara tahun 2020–2026; dan (4) tersedia teks lengkap (full text). Kriteria eksklusi mencakup: (1) artikel yang hanya membahas desain Kurikulum Merdeka secara umum tanpa menyentuh aspek evaluasi; (2) artikel berbentuk opini

atau editorial tanpa data empiris; serta (3) artikel yang tidak dapat diverifikasi sumber dan validitasnya. Dari 87 artikel teridentifikasi, 34 artikel dieksklusi berdasarkan kriteria di atas, 33 artikel dieksklusi setelah pembacaan teks lengkap karena tidak relevan dengan fokus penelitian, sehingga 20 artikel dinyatakan memenuhi kriteria dan dianalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik (thematic analysis) melalui tiga tahap. Pertama, setiap artikel dikodekan berdasarkan empat dimensi utama: (a) bentuk dan jenis evaluasi yang diterapkan, (b) konteks sekolah/jenjang, (c) kendala implementasi, dan (d) strategi atau solusi yang disarankan. Kedua, kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam tema-tema yang muncul secara konsisten lintas artikel. Ketiga, tema-tema tersebut disintesis untuk menghasilkan gambaran holistik dan dikonseptualisasikan menggunakan kerangka teori yang relevan. Untuk menjaga validitas, setiap temuan dikonfirmasi minimal dari dua sumber independen (triangulasi sumber) sebelum disertakan dalam pembahasan.

Sebagai tambahan sumber data, dokumen resmi kebijakan pendidikan digunakan sebagai data sekunder untuk memetakan konteks regulasi implementasi Kurikulum Merdeka. Dokumen tersebut mencakup Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Penilaian Pendidikan, Panduan Asesmen Kurikulum Merdeka yang diterbitkan Kemendikbudristek, serta surat keputusan terkait implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan.

Proses seleksi artikel divisualisasikan dalam diagram PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang menunjukkan alur dari identifikasi (87 artikel), skrining (53 artikel), kelayakan (20 artikel), hingga inklusi final untuk dianalisis secara mendalam. [5]

Analisis tematik dilaksanakan secara induktif-deduktif. Secara induktif, tema-tema dibangun dari kode-kode yang muncul dalam literatur; secara deduktif, tema-tema tersebut diuji dan dikonseptualisasikan menggunakan kerangka teori yang relevan, antara lain Cognitive Load Theory [21] untuk menganalisis kendala beban kognitif guru, dan teori Kesiapan Perubahan Organisasi (Readiness for Change) untuk memahami tantangan adaptasi institusional terhadap sistem evaluasi baru.

Hasil akhir dari proses analisis ini disajikan dalam bentuk: (1) narasi deskriptif-analitis per tema; (2) tabel matriks sintesis literatur yang merangkum temuan dari 20 artikel yang dianalisis; dan (3) model rekomendasi strategis sebagai kontribusi baru artikel ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis tematik terhadap 20 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, penelitian ini mengidentifikasi empat tema utama: (1) ragam bentuk dan praktik evaluasi yang diterapkan, (2) faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi, (3) kendala-kendala struktural dan pedagogis, serta (4) strategi peningkatan efektivitas evaluasi. Tabel 1 menyajikan matriks sintesis dari artikel-artikel yang dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang lanskap penelitian ini. Temuan secara keseluruhan menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten antara desain evaluasi ideal dalam kebijakan Kurikulum Merdeka (das Sollen) dengan realitas implementasinya di lapangan (das Sein), terutama yang disebabkan oleh beban kognitif berlebih pada guru dan kesiapan institusional yang tidak merata.[6]

Implementasi Evaluasi Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah mulai menerapkan evaluasi pembelajaran sesuai prinsip Kurikulum Merdeka. Evaluasi dilakukan secara fleksibel dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik, capaian pembelajaran, serta kondisi sekolah masing-masing. Guru tidak hanya menggunakan tes tertulis sebagai alat evaluasi, tetapi juga memanfaatkan asesmen berbasis proyek, portofolio, observasi, presentasi, dan refleksi pembelajaran.

Berdasarkan hasil analisis beberapa jurnal, implementasi evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka lebih banyak menggunakan asesmen formatif dibandingkan asesmen sumatif. Guru memberikan penilaian secara bertahap selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa. Hal ini dilakukan agar guru dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif.[7]

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa asesmen diagnostik mulai diterapkan sebelum pembelajaran dimulai. Guru melakukan identifikasi terhadap kemampuan awal siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kebutuhan belajar peserta didik. Melalui asesmen diagnostik, guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi siswa di kelas.[8]

Selain itu, penerapan evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif terhadap keterlibatan siswa dalam proses belajar. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam berdiskusi, mengerjakan proyek, serta menyampaikan pendapat selama pembelajaran berlangsung. Sistem evaluasi yang lebih variatif membuat siswa tidak hanya fokus pada nilai akhir, tetapi juga pada proses belajar dan pengembangan keterampilan.

Bentuk Evaluasi Pembelajaran yang Digunakan

Berdasarkan hasil kajian penelitian, terdapat beberapa bentuk evaluasi pembelajaran yang paling sering digunakan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu:

a. Asesmen Formatif

Asesmen formatif menjadi bentuk evaluasi yang paling dominan digunakan dalam Kurikulum Merdeka. Guru melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung melalui tanya jawab, diskusi kelompok, kuis, tugas individu, maupun observasi aktivitas siswa. Hasil asesmen digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa dan menentukan tindak lanjut pembelajaran.

Penelitian menunjukkan bahwa asesmen formatif membantu guru memahami perkembangan kemampuan peserta didik secara lebih mendalam. Siswa juga merasa lebih termotivasi karena mendapatkan umpan balik secara langsung dari guru.[7]

b. Penilaian Berbasis Proyek

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian berbasis proyek banyak diterapkan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam kegiatan proyek, siswa diminta menyelesaikan tugas tertentu baik secara individu maupun kelompok. Guru kemudian menilai proses kerja, hasil akhir, serta kemampuan kerja sama siswa.[9]

Bentuk penilaian ini dianggap lebih efektif karena mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah.

c. Portofolio

Portofolio digunakan sebagai dokumentasi perkembangan belajar siswa selama proses pembelajaran. Guru mengumpulkan hasil tugas, laporan, maupun karya siswa sebagai bahan evaluasi. Melalui portofolio, guru dapat melihat perkembangan kemampuan peserta didik secara berkelanjutan.

d. Observasi Sikap dan Keterampilan

Guru melakukan observasi selama proses pembelajaran berlangsung untuk menilai sikap, kedisiplinan, tanggung jawab, serta keterampilan sosial siswa. Penilaian ini dilakukan untuk mendukung pembentukan karakter peserta didik sesuai tujuan Kurikulum Merdeka.

Kendala dalam Implementasi Evaluasi Pembelajaran

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai penelitian dan kajian literatur, implementasi evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di sekolah. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari guru sebagai pelaksana pembelajaran, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, kesiapan peserta didik, lingkungan sekolah, hingga sistem pendidikan yang masih berada dalam tahap penyesuaian terhadap kebijakan baru. Meskipun Kurikulum Merdeka dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diperhatikan agar tujuan kurikulum dapat tercapai secara optimal.[10]

a. Kurangnya Pemahaman Guru terhadap Sistem Evaluasi Kurikulum Merdeka

Salah satu kendala utama dalam implementasi evaluasi pembelajaran adalah masih terbatasnya pemahaman guru mengenai konsep asesmen pada Kurikulum Merdeka. Perubahan sistem penilaian dari kurikulum sebelumnya menuju sistem asesmen yang lebih fleksibel memerlukan proses adaptasi yang tidak singkat. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam memahami perbedaan antara asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif serta cara penerapannya dalam proses pembelajaran. Fenomena ini dapat dipahami melalui lensa Cognitive Load Theory [21]: ketika guru dihadapkan pada tuntutan simultan untuk mengajar, mengelola kelas, menyusun perangkat ajar baru, dan sekaligus merancang instrumen asesmen yang berbeda secara paradigmatik dari yang sebelumnya, kapasitas kognitif kerja (working memory) mereka menjadi terbebani melebihi batas optimalnya (cognitive overload). Kondisi ini secara empiris terbukti menghambat pembelajaran profesional guru dan menurunkan kualitas implementasi inovasi kurikulum.[11]

Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa guru masih terbiasa menggunakan metode penilaian konvensional yang berorientasi pada tes tertulis dan nilai akhir. Kondisi tersebut menyebabkan evaluasi pembelajaran belum sepenuhnya mampu menggambarkan perkembangan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Selain itu, sebagian guru juga masih merasa kesulitan dalam menyusun instrumen asesmen yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan karakteristik siswa.

Kurangnya pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pemahaman guru terhadap sistem evaluasi pada Kurikulum Merdeka. Tidak semua guru memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti pelatihan terkait asesmen pembelajaran, terutama guru yang berada di daerah dengan akses pendidikan yang terbatas. Akibatnya, implementasi evaluasi pembelajaran di setiap sekolah menjadi berbeda-beda tergantung pada tingkat pemahaman dan kesiapan guru.[12]

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Kendala lain yang cukup sering ditemukan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Dalam Kurikulum Merdeka, evaluasi pembelajaran mulai diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital seperti penggunaan aplikasi pembelajaran, kuis online, platform asesmen digital, dan media interaktif lainnya. Namun, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung penerapan evaluasi berbasis teknologi tersebut.[13]

Beberapa sekolah, khususnya di daerah terpencil, masih mengalami keterbatasan akses internet, kurangnya perangkat komputer atau laptop, serta minimnya media pembelajaran digital. Kondisi ini menyebabkan guru kesulitan menerapkan evaluasi pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi. Bahkan dalam beberapa kasus, proses evaluasi masih dilakukan secara manual karena keterbatasan fasilitas yang tersedia.[12]

Selain itu, keterbatasan anggaran sekolah juga menjadi hambatan dalam penyediaan sarana pembelajaran yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Sekolah membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menyediakan perangkat teknologi, jaringan internet, serta pelatihan penggunaan media digital bagi guru dan siswa. Ketidaksiapan fasilitas ini menyebabkan pelaksanaan evaluasi pembelajaran belum berjalan secara maksimal.

c. Beban Administrasi Guru yang Masih Tinggi

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyusun perangkat pembelajaran dan sistem evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun pada kenyataannya, banyak guru masih menghadapi beban administrasi yang cukup tinggi. Guru tidak hanya bertanggung jawab dalam mengajar, tetapi juga harus menyusun modul ajar, perangkat asesmen, laporan perkembangan siswa, hingga berbagai administrasi sekolah lainnya. Dalam perspektif teori Kesiapan Perubahan Organisasi (Readiness for Change), Holt dkk. [22] menegaskan bahwa keberhasilan implementasi perubahan tidak semata bergantung pada kualitas kebijakan, melainkan pada tiga dimensi kesiapan yang harus terpenuhi secara bersamaan: kesiapan individual (guru memiliki kompetensi dan motivasi), kesiapan institusional (sekolah memiliki kapasitas dan sumber daya), serta kesiapan kontekstual (lingkungan mendukung perubahan). Data dari berbagai penelitian yang dikaji menunjukkan bahwa ketiga dimensi ini belum terpenuhi secara merata di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, sehingga menciptakan disparitas kualitas implementasi evaluasi yang signifikan antara sekolah perkotaan dan daerah.

Beban administrasi yang berlebihan membuat sebagian guru merasa kesulitan membagi waktu antara proses pembelajaran dan penyusunan evaluasi pembelajaran yang berkualitas. Akibatnya, beberapa guru cenderung menggunakan bentuk penilaian yang sederhana dan praktis tanpa melakukan pengembangan asesmen secara mendalam sesuai prinsip Kurikulum Merdeka.[14]

Selain itu, proses penilaian yang berorientasi pada perkembangan peserta didik membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sistem penilaian konvensional. Guru perlu melakukan observasi, memberikan umpan balik, menilai proyek, serta mendokumentasikan perkembangan siswa secara berkelanjutan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terutama bagi guru yang mengajar dalam jumlah siswa yang banyak.

d. Perbedaan Karakteristik dan Kemampuan Peserta Didik

Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Namun dalam praktiknya, guru menghadapi tantangan karena setiap siswa memiliki kemampuan, minat, gaya belajar, serta tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Kondisi tersebut membuat guru perlu menyesuaikan bentuk evaluasi agar dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan siswa di kelas.

Sebagian siswa mampu mengikuti pembelajaran dan evaluasi dengan baik, sementara siswa lainnya masih membutuhkan pendampingan lebih intensif. Perbedaan kemampuan ini menyebabkan guru harus bekerja lebih keras dalam merancang evaluasi yang adil dan sesuai dengan kondisi peserta didik.[15]

Selain itu, tidak semua siswa terbiasa dengan sistem evaluasi yang menuntut keaktifan, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Sebagian peserta didik masih terbiasa dengan pembelajaran yang berorientasi pada hafalan dan tes tertulis. Akibatnya, siswa memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem evaluasi pada Kurikulum Merdeka.

e. Adaptasi terhadap Perubahan Sistem Pendidikan

Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia sehingga membutuhkan proses adaptasi dari seluruh pihak, baik guru, siswa, sekolah, maupun orang tua. Perubahan sistem evaluasi dari yang sebelumnya berfokus pada angka menuju penilaian yang lebih holistik menimbulkan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.[16] Sebagian guru dan orang tua masih memiliki pandangan bahwa keberhasilan belajar hanya diukur melalui nilai akademik. Padahal dalam Kurikulum Merdeka, evaluasi pembelajaran juga menilai keterampilan, sikap, kreativitas, dan perkembangan karakter siswa. Perubahan paradigma ini membutuhkan pemahaman yang lebih luas agar sistem evaluasi dapat diterima dan diterapkan dengan baik.[17]

Selain itu, proses adaptasi juga dipengaruhi oleh kesiapan sekolah dalam memahami kebijakan baru. Tidak semua sekolah memiliki kemampuan yang sama dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sehingga terdapat perbedaan kualitas pelaksanaan evaluasi pembelajaran antar sekolah.

f. Kurangnya Kolaborasi antara Sekolah dan Orang Tua

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka memerlukan kerja sama yang baik antara guru, sekolah, dan orang tua. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua masih belum berjalan secara optimal.[18]

Sebagian orang tua belum memahami konsep evaluasi pada Kurikulum Merdeka sehingga kurang memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran anak di rumah. Masih terdapat anggapan bahwa keberhasilan belajar hanya ditentukan oleh nilai rapor tanpa memperhatikan perkembangan keterampilan dan karakter peserta didik.

Kurangnya keterlibatan orang tua menyebabkan proses evaluasi pembelajaran menjadi kurang maksimal, terutama dalam memantau perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif antara sekolah dan orang tua mengenai tujuan dan sistem evaluasi dalam Kurikulum Merdeka.

g. Kesulitan dalam Menyusun Instrumen Penilaian

Kendala lain yang sering dihadapi guru adalah kesulitan dalam menyusun instrumen evaluasi yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Dalam Kurikulum Merdeka, penilaian tidak hanya mengukur kemampuan kognitif, tetapi juga aspek keterampilan dan karakter peserta didik.[19]

Penyusunan instrumen penilaian yang mampu mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh membutuhkan kreativitas dan kemampuan pedagogik yang baik. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam menentukan indikator penilaian, rubrik asesmen, serta teknik evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Akibatnya, pelaksanaan evaluasi pembelajaran belum sepenuhnya mampu menggambarkan kemampuan peserta didik secara objektif dan komprehensif. Oleh sebab itu, guru memerlukan pendampingan dan pelatihan khusus dalam pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka.

Upaya Peningkatan Efektivitas Evaluasi Pembelajaran

Berdasarkan sintesis dari berbagai penelitian yang dikaji, upaya peningkatan efektivitas evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka tidak cukup jika hanya berupa daftar rekomendasi generik. Diperlukan sebuah model rekomendasi strategis yang terintegrasi dan mempertimbangkan ketiga dimensi kesiapan (individual, institusional, kontekstual) secara simultan. Artikel ini merumuskan Model Penguatan Evaluasi Berjenjang (MPEB) yang terdiri dari tiga lapisan intervensi dengan aktor, sasaran, dan indikator keberhasilan yang spesifik, sebagaimana diuraikan berikut ini.[20]

Pertama, Intervensi Lapisan Mikro (Guru & Kelas): Untuk mengatasi cognitive overload, pelatihan asesmen harus dirancang menggunakan prinsip segmentasi kognitif—dipecah menjadi modul-modul kecil yang spesifik (misal: khusus asesmen diagnostik awal, khusus penyusunan rubrik proyek) daripada pelatihan generik satu hari. Sekolah perlu menyediakan bank instrumen asesmen siap pakai yang dapat diadaptasi guru, sehingga mengurangi beban penyusunan dari nol. Indikator keberhasilan: minimal 80% guru di satuan pendidikan mampu menyusun dan menggunakan satu jenis asesmen formatif non-tes secara konsisten dalam satu semester.

Kedua, Intervensi Lapisan Meso (Sekolah & Manajemen): Kepala sekolah perlu mengambil peran aktif sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader) dengan: (a) mengintegrasikan pembahasan hasil asesmen ke dalam agenda rapat rutin guru; (b) membentuk komunitas praktik (professional learning community) internal yang memfasilitasi berbagi praktik asesmen terbaik antarguru; dan (c) merasionalisasi beban administrasi dengan mengidentifikasi dan mengeliminasi laporan-laporan yang redundan. Penyediaan infrastruktur teknologi perlu diprioritaskan dalam rencana anggaran sekolah, khususnya bagi sekolah di daerah tertinggal yang dapat memanfaatkan skema BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk pengadaan perangkat dan koneksi internet.

Ketiga, Intervensi Lapisan Makro (Kebijakan & Pemerintah): Kementerian perlu melakukan evaluasi reguler terhadap efektivitas implementasi kebijakan asesmen Kurikulum Merdeka menggunakan instrumen monitoring yang terstandar. Pengurangan beban administrasi harus dimandatkan secara regulatif, bukan hanya dianjurkan. Pemerintah daerah perlu menganggarkan program pendampingan asesmen yang berkelanjutan (bukan hanya pelatihan satu kali) dengan melibatkan pengawas sekolah terlatih sebagai agen pendampingan lapangan. Selain itu, perlu dikembangkan platform digital nasional yang menyediakan bank instrumen asesmen Kurikulum Merdeka yang terverifikasi dan dapat diakses gratis oleh seluruh guru di Indonesia.

Keempat, Penguatan Ekosistem Evaluasi (Sekolah-Orang Tua-Komunitas): Keterlibatan orang tua tidak cukup melalui pembagian rapor semesteran. Sekolah perlu mengembangkan mekanisme komunikasi evaluasi yang transparan dan berkala, misalnya melalui laporan perkembangan digital mingguan/bulanan yang menampilkan portofolio belajar siswa. Hal ini akan membantu mengubah paradigma orang tua dari “nilai adalah segalanya” menuju apresiasi terhadap perkembangan proses dan karakter, sejalan dengan tujuan holistik Kurikulum Merdeka.

Kelima, Riset dan Pengembangan Berkelanjutan: Diperlukan penelitian longitudinal dan empiris yang mengukur dampak berbagai bentuk asesmen Kurikulum Merdeka terhadap capaian belajar siswa jangka panjang. Tanpa evidence base yang kuat, kebijakan evaluasi akan terus bergantung pada asumsi normatif. Model MPEB yang dirumuskan dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan bagi pengambil kebijakan dalam merancang program penguatan implementasi evaluasi Kurikulum Merdeka yang lebih sistematis dan terukur.

Interpretasi Hasil Penelitian

Secara keseluruhan, sintesis dari 20 artikel yang dikaji mengungkapkan tiga pola temuan yang konsisten. Pertama, terdapat kesenjangan implementasi berbasis konteks (context-based implementation gap): sekolah di perkotaan dengan akses sumber daya lebih baik cenderung mengimplementasikan evaluasi Kurikulum Merdeka lebih komprehensif dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan evaluasi yang seragam tidak dapat diterapkan secara “one size fits all” tanpa mempertimbangkan heterogenitas kapasitas satuan pendidikan. Kedua, terdapat paradoks otonomi evaluasi: fleksibilitas yang diberikan Kurikulum Merdeka kepada guru justru menimbulkan kebingungan bagi guru yang belum memiliki kompetensi pedagogik yang cukup untuk merancang evaluasi yang valid dan reliabel secara mandiri. Ini berdialog dengan konsep “kebebasan yang membebani” (burden of freedom) dalam teori perubahan organisasi. Ketiga, evaluasi holistik versus tekanan nilai: meskipun Kurikulum Merdeka mendorong evaluasi proses dan karakter, tekanan sosial dari orang tua dan persepsi masyarakat yang masih berorientasi pada nilai akademik menciptakan tegangan yang memaksa guru untuk tidak sepenuhnya meninggalkan penilaian konvensional berbasis angka.

Temuan-temuan di atas memiliki implikasi teoretis yang penting: efektivitas implementasi evaluasi Kurikulum Merdeka tidak dapat dipahami hanya dari perspektif teknis-pedagogis, tetapi harus dilihat sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kognitif (beban kerja guru), institusional (kesiapan sekolah), sosial-budaya (ekspektasi orang tua), dan struktural (kesenjangan sumber daya). Model MPEB yang dirumuskan dalam artikel ini menjawab kompleksitas tersebut dengan menawarkan kerangka intervensi yang bekerja secara simultan di tiga lapisan (mikro-meso-makro).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka, dapat disimpulkan bahwa sistem evaluasi dalam Kurikulum Merdeka membawa perubahan yang cukup besar terhadap proses penilaian pembelajaran di sekolah. Evaluasi pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada hasil akhir berupa nilai akademik, tetapi lebih menekankan pada perkembangan kemampuan peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka berusaha menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi evaluasi pembelajaran dilakukan melalui berbagai bentuk asesmen seperti asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Guru juga mulai menerapkan penilaian berbasis proyek, portofolio, observasi, serta refleksi pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik secara lebih mendalam. Penerapan evaluasi yang lebih variatif memberikan dampak positif terhadap aktivitas belajar siswa karena peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Selain memberikan dampak positif, implementasi evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka juga masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa guru masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep asesmen yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka, terutama dalam penyusunan instrumen penilaian dan penerapan asesmen formatif. Keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, khususnya penggunaan teknologi digital, juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran di beberapa sekolah. Selain itu, tingginya beban administrasi guru serta perbedaan karakteristik peserta didik membuat proses evaluasi membutuhkan penyesuaian yang lebih kompleks.

Berdasarkan temuan penelitian, keberhasilan implementasi evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Guru perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan agar mampu memahami serta menerapkan sistem evaluasi sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Sekolah dan pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai untuk mendukung proses evaluasi yang lebih efektif dan inovatif. Di samping itu, kerja sama antara guru, orang tua, dan lingkungan sekolah sangat penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang mampu mendukung perkembangan peserta didik secara optimal.

Dengan demikian, evaluasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia apabila dilaksanakan secara konsisten, terencana, dan didukung oleh kesiapan sumber daya manusia serta fasilitas pendidikan yang memadai. Sistem evaluasi yang berorientasi pada proses dan pengembangan kompetensi diharapkan mampu menciptakan peserta didik yang lebih mandiri, kreatif, kritis, dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman

REFERENCES

- [1] E. Indriani, R. T. Utami, and G. Vernanda, "Implementasi Kurikulum Merdeka pada Fase A Tunagrahita," vol. 6, no. November, pp. 8854–8860, 2023.
- [2] A. F. Nasution, S. Ningsih, M. F. Silva, and L. Suharti, "COMPETITIVE : Journal of Education Konsep Dan Implementasi Kurikulum Merdeka," vol. 2, no. 3, pp. 201–211, 2023.
- [3] K. Merdeka, "Jurnal al burhan staidaf," vol. 3, no. 1, 2023.
- [4] N. Januari *et al.*, "Evaluasi Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka," vol. 2, no. 1, 2024.
- [5] S. Wahyuni, F. P. Rahmawati, and A. Gufron, "Analisis Pandangan Guru Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka," *Pendas J. Ilm. Pendidik. Dasar*, vol. 09, no. 04, pp. 2548–6950, 2024.
- [6] U. Sultan, A. Tirtayasa, U. Sultan, and A. Tirtayasa, "JPD : Jurnal Pendidikan Dasar DI SEKOLAH DASAR Susi Saraswati Binti Fatman Sholeh Hidayat".
- [7] S. N. Nasution, "Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI pada Kurikulum Merdeka di SDN 067090 Medan," vol. 9, pp. 27508–27513, 2025.
- [8] S. Nabila, "Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Menggunakan Model CIPP (Context , Input , Process , dan Product)," vol. 0738, no. 2, pp. 302–309, 2025.
- [9] E. D. Tampubolon, S. M. Panjaitan, and L. D. Simbolon, "JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Evaluation Of The Implementation Of The Independent Curriculum With The Cipp Model (Context , Input , Process And Product) At Employee Tanjung Morawa Junior Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Dengan Model Cipp (Context , Input , Process And Product) Di Smp Karyawan Tanjung Morawa memerlukan evaluasi melalui kegiatan penilaian . Setiap program yang telah disetujui dan rencana atau tidak . Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur kinerja , efektivitas , dan dampak didik melalui sekumpulan mata pelajaran untuk mencapai tujuan tertentu (Cholilah dkk ., 2023). pendekatan kurikulum yang menonjolkan fleksibilitas . Selain itu , pendekatan ini menekankan untuk menyusun kurikulum berdasarkan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik .," vol. 7, no. 4, pp. 2041–2053, 2026.
- [10] Mohammad Rafatta Umar, Charren Galuh Indraswari, Dwi Desky Setiawan, Reivania Calista, and Fakhuri Fatkhuri, "Analisis Model Kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia," *Amandemen J. Ilmu pertahanan, Polit. dan Huk. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 66–76, 2024, doi: 10.62383/amandemen.v2i1.670.
- [11] E. D. A. N. Pembaruan, M. A. N. Labuhanbatu, and S. Utara, "IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN :," vol. 10, no. 2, pp. 121–127, 2024.
- [12] "Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah," *Jurnal Edu Research IICLS*, vol. 6, pp. 57–64, 2024.
- [13] N. N. Syifa, P. A. Sari, S. Surya, and P. Wijaya, "Evaluasi Implementasi Asesmen Formatif dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Mendalam Pada Fase B Kurikulum Merdeka di SDN," vol. 10, pp. 1142–1145, 2026.
- [14] M. F. Mukhdlor, A. R. Syam, and M. A. Syahri, "Evaluasi Implementasi Menggunakan CIPP Kurikulum Merdeka," no. 3, pp. 1–9, 2024.
- [15] "Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan," *Jurnal Inovasi Pendidikan*, vol. 8, no. 1, pp. 149–158, 2026.
- [16] A. R. Karim and N. Suaedi, "Optimalisasi Evaluasi Pembelajaran Berbasis Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar," vol. 14, pp. 82–87, 2025.
- [17] "Analisis Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar," vol. 8, pp. 238–244, 2022.

- [18] I. Sumarsih, T. Marliyani, Y. Hadiyansah, and A. H. Hernawan, “Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar,” vol. 6, no. 5, pp. 8248–8258, 2022.
- [19] U. Sultan, A. Tirtayasa, U. Sultan, and A. Tirtayasa, “JPD : Jurnal Pendidikan Dasar DI SEKOLAH DASAR”.
- [20] D. Syafriani *et al.*, “Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas : Tantangan , Strategi , dan Dampaknya terhadap Pembelajaran,” vol. 9, pp. 9609–9615, 2025.
- [21] J. Sweller, “Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning,” *Cognitive Science*, vol. 12, no. 2, pp. 257–9615, 1988.
- [22] D. T. Holt, A. A. Armenakis, H. S. Feild, and S. G. Harris, “Readiness for Organizational Change: The Systematic Development of a Scale,” *The Journal of Applied Behavioral Science*, vol. 43, no. 2, pp. 232–255, 2007.